

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Bachsan Mustafa. (1984). *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Remadja Karya.
- Encik, M. F. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hans Kelsen. (2008). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Hari, S. (2003). *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa
- Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Pudyatmoko, Sri. (2009). *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusadi Kantaprawira. (1988). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Salim, H. . (2012). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soerjono Soekanto. (1986). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sri Soemantri. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Cet.1). Yogyakarta: Liberty.
- Sudjana, Nana. (2014). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, ade maman. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Sutedi, A. (2017). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasin, Muhammad Nur, (2018). *Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia, Cet. 1*. Malang: UIN Maliki Press.

B. Karya Ilmiah/ Jurnal

- Arizona, Y. (2010). *Negara Hukum Bernurani, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia, Paper dipresentasikan dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok*. Epistema Institue.
- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654.
- Attamimi, A. H. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Bramanta, I. N. S., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 120–127.
- Dwi Cahyo, R. P., & Adhitama, S. (2018). Tinjauan Atas Pengawasan Terhadap Perizinan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Beralkohol. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2(2), 1–19.
- Erick S. Holle. (2011). *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public*

Service'. *Jurnal Sasi*, 17.

- Iriani, Dewi, (2011). Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Supremasi Sistem Penegakan Hukum, *Justucia Islamica*, 8(1).
- Lestari, T. R. P. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 7.
- Maulana, R., & Jamhir. (2018). Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan. *Jurnal Ar-Raniry*, 3(1), 90–115.
- Merdie, Elok Ratnasari Van, H. W., & (S1. (2020). Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios Di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum*, 7(1), 38.
- Nur Faridah. (2018). *Analisis Saddu Al- Dzari'ah Terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Bera/Lkohol*. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
- Noorhidayah. (2018). Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya. *EL-Mashlahah*, 8(2), 146–161.
- Rori, & Patria, P. L. (2016). Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Holistik*.
- Savitri, R., & Fransiska, E. (2022). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Dki Jakarta Kelurahan Pulo Gebang , Kecamatan Cakung. *Plano Krisna*, 18(1), 28–45.
- Selamat Riadi. (2021). *Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Satpol PP Kabupaten)*. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sikumbang, S. M., Sjarif, F. A., & Salampessy, M. Y. (2015). *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. HKUM4403-M1.
- Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al- Amwal*, 2(1), 78–94.
- Syamsudin, M. (2020). Pemberian Izin Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol. *Ilmu Hukum*, 7(1), 1–20.
- Wijaya, M. H. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 199–214.

Wollanda, D. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang*. Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190).

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor. 86/ Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341).

Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 3).

D. Internet

<http://bpkahm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/>.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)).

<https://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/01/27/memahami-makna-preventif-dan-contoh-tindakan-pencegahan-dalam-kehidupan-sehari-hari>

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

[workshop_peraturan_kebijakan_di_kementrian_PPN_bappenas.pdf](#).